

Ideologi dan Representasi Sosial dalam Wacana Barak Militer Dedi Mulyadi: Pendekatan Norman Fairclough

Drestha Surya Yogiswara¹, Nanik Setyawati², Icu Prayogi³

^{1,2,3} Universitas PGRI Semarang, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Drestha Surya Yogiswara

dresthasurya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur linguistik dan retorik dalam teks berita yang membingkai wacana barak militer, mengidentifikasi dan menginterpretasikan ideologi yang terkandung, serta mendeskripsikan representasi sosial terhadap tokoh, kelompok sasaran, dan nilai-nilai sosial dibentuk dalam teks dan praktik wacana. Data penelitian berupa teks berita media daring *BBC News Indonesia*, *Okezone News*, *Tempo.co*, *Kompas.com*, dan *Jawa Pos*. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan teknik simak dan catat. Analisis menggunakan model tiga dimensi wacana Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur linguistik dan retorik dalam teks berita yang membingkai wacana barak militer berupa labelisasi dan eufemisme sebagai mekanisme kuasa simbolik, struktur kontras dan negasi sebagai strategi legitimasi, pilihan leksikal formal dan teknis sebagai bentuk rasionalisasi kebijakan, serta metafora dan hiperbola sebagai pembentuk persepsi moral dan krisis; ideologi yang tecermin berupa ideologi kritis humanistik, tekno-birokratis dan reformis, hak anak dan etika sosial, paternalistik-moral dan kolaboratif, serta disiplin-ekonomistik; dan representasi sosial terhadap tokoh dan sasaran dalam wacana meliputi representasi anak dan KDM. Anak direpresentasikan sebagai korban sistem sosial dan pendidikan yang gagal memberikan perlindungan dan sebagai subjek moral yang perlu dibina, bukan korban. KDM direpresentasikan sebagai figur ayah bangsa dan pembimbing moral dan sebagai figur paradoksal antara moralitas dan kontrol sosial. Kemudian, nilai yang diusung adalah yang berakar pada empati, kebebasan, hak anak, serta demokrasi pendidikan; profesionalisme, rasionalitas, dan akuntabilitas publik; tanggung jawab moral, kemanusiaan, dan kolaborasi sosial; serta disiplin, ketertiban, dan nasionalisme produktif.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, ideologi, representasi sosial, barak militer, media daring.

Pendahuluan

Wacana publik di Indonesia kerap menjadi arena pertarungan ideologis, khususnya ketika berkaitan dengan isu sosial seperti kenakalan remaja, degradasi moral, dan ketertiban masyarakat. Salah satu wacana yang menimbulkan diskursus luas adalah gagasan Dedi Mulyadi (selanjutnya disebut KDM) mengenai pembentukan “barak militer” sebagai solusi penanganan anak-anak nakal dan sulit diatur. Melalui narasi yang menonjolkan kedisiplinan, ketegasan, dan nasionalisme, KDM menghadirkan konstruksi sosial tertentu tentang remaja sebagai kelompok yang membutuhkan kontrol dan pembinaan keras, sehingga bahasa yang digunakan tidak hanya sekadar medium ekspresi, melainkan juga alat produksi realitas sosial dan reproduksi kekuasaan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian kritis terhadap ideologi dan representasi sosial yang bekerja di balik wacana tersebut, terutama melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis

(AWK) Fairclough yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang sarat relasi kekuasaan.

Wacana barak militer menjadi signifikan untuk diteliti karena memunculkan perdebatan publik yang tajam, baik dari kelompok yang mendukung maupun pihak yang mengkritiknya karena dianggap berpotensi melanggar militerisme dan merugikan kelompok rentan. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa wacana itu tidak hanya usulan kebijakan, tetapi juga mengandung muatan ideologis terkait pandangan atas moralitas, kontrol sosial, dan posisi generasi muda dalam struktur masyarakat. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk mengkaji bagaimana media mengonstruksi wacana ini, siapa yang diberi suara atau dibungkam, serta bagaimana representasi sosial direproduksi melalui praktik diskursif.

Sejumlah penelitian telah mengkaji wacana yang berkaitan dengan ideologi, konstruksi sosial, dan kontestasi makna melalui media maupun ujaran publik. Putri et al. (2025) menganalisis wacana pro-kontra pengiriman anak ke barak militer dalam pemberitaan daring Liputan6.com menggunakan model AWK van Dijk. Ia mengungkap bagaimana struktur makro, superstruktur, dan mikro media membingkai perdebatan antara pendekatan militeristik dan orientasi hak anak. Meskipun relevan pada kesamaan objek, penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan Fairclough sehingga belum menyentuh analisis tiga dimensi terkait produksi dan konsumsi teks serta konteks sosialnya.

Penelitian lain yang menggunakan kerangka Fairclough, seperti Fajri (2025), Pratama et al. (2022), serta Ima dan Dawud (2021), menyoroti representasi ideologi dalam pidato politis, wacana media sosial, dan program televisi. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan Fairclough mampu mengungkap strategi retorik, pertarungan simbolik, serta representasi kekuasaan yang tersembunyi melalui struktur lingual dan praktik wacana. Hal yang sama ditunjukkan oleh Zainuddin et al. (2021) dan Restiani dan Darmayanti (2019) yang membuktikan bagaimana ideologi media dan representasi politisi dapat dibaca melalui analisis tiga dimensi. Namun, penelitian tersebut tidak mengkaji wacana barak militer KDM secara khusus, dan tidak menyoroti pembentukan representasi sosial terhadap kelompok remaja dalam konteks wacana kontrol dan disiplin.

Berdasarkan tinjauan tersebut, teridentifikasi adanya kesenjangan penelitian, terutama pada dua aspek. Secara empiris, belum terdapat penelitian yang menelaah wacana barak militer KDM menggunakan AWK Fairclough, padahal wacana ini memiliki implikasi sosial dan politik yang luas dalam pembentukan opini publik. Secara teoretis, belum ada kajian yang secara bersamaan menguraikan konstruksi ideologi dan representasi sosial yang terbentuk dalam wacana tersebut melalui analisis tiga dimensi Fairclough. Kekosongan itu menunjukkan perlunya penelitian yang mampu mengintegrasikan analisis linguistik, praktik produksi wacana, serta struktur sosial yang melatarbelakanginya secara komprehensif.

Masalah penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana struktur linguistik dan retorik teks media membingkai wacana barak militer? (2) Ideologi apa yang tecermin secara eksplisit maupun implisit dalam wacana tersebut? (3) Bagaimana representasi sosial terhadap tokoh, kelompok sasaran, dan nilai-nilai kedisiplinan dibentuk melalui teks dan praktik wacana media? Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur linguistik dan retorik, mengidentifikasi ideologi yang terkandung, serta menjelaskan representasi sosial yang dibangun melalui praktik diskursif media. Kebaruan penelitian terletak pada fokusnya terhadap wacana

barak militer KDM serta integrasi analisis ideologi dan representasi sosial dalam konteks wacana kontrol sosial terhadap remaja di ruang publik.

Wacana, dalam kajian kritis, dipahami sebagai praktik sosial yang tidak dapat dipisahkan dari ideologi dan struktur kekuasaan. Wacana terdiri atas tiga dimensi (teks, kognisi sosial, dan konteks sosial) yang saling berkaitan dalam memproduksi makna dan menjaga dominasi ideologis (Van Dijk, 2008). Dalam konteks ini, bahasa tidak pernah netral karena memuat nilai, keyakinan, serta kepentingan sosial pembicara. Fairclough (2010) menambahkan bahwa wacana merupakan bentuk dialektika antara struktur sosial dan praktik linguistik, sehingga bahasa dapat menjadi alat untuk mempertahankan atau menantang kekuasaan. Hal itu diperluas oleh Foucault (1981) dengan melihat wacana sebagai mekanisme yang mengatur apa yang dapat dikatakan dan siapa yang berhak berbicara. Wacana menjadi instrumen pengendalian sosial yang menentukan batas pengetahuan dalam masyarakat.

Analisis Wacana Kritis Fairclough dengan tiga dimensi analisis dijadikan dasar penelitian ini karena memungkinkan peneliti melihat bagaimana makna dibentuk melalui bahasa, diproduksi dan dikonsumsi dalam institusi media, serta dihubungkan dengan struktur sosial-politik yang lebih luas (Fairclough, 1992, 1995, 2010). Dimensi teks berfokus pada unsur mikro linguistik seperti diksi, struktur kalimat, metafora, dan modalitas yang dapat menyimpan bias ideologis tertentu (Richardson, 2007). Dimensi praktik wacana menelaah teks diproduksi oleh media, didistribusikan, dan ditafsirkan publik (Wodak & Meyer, 2009). Kemudian, dimensi praktik sosial mengarah pada bagaimana wacana memperkuat atau menantang kekuasaan (Van Dijk, 2008).

Ideologi merupakan mekanisme reproduksi kekuasaan. Pendapat itu diperkuat oleh Althusser (1971) yang melihat ideologi bekerja melalui aparatus ideologis seperti media dan institusi budaya. Ideologi beroperasi lewat interpelasi, yang menjadikan individu sebagai subjek yang tanpa sadar menerima nilai-nilai dominan sebagai sesuatu yang alamiah. Gagasan itu diadopsi dalam AWK dengan menunjukkan bahwa ideologi bekerja melalui bahasa dan struktur wacana (Fairclough, 1995, 2010). Diksi seperti *pembinaan*, *kedisiplinan*, atau *kenakalan remaja* dapat menormalkan relasi kuasa tertentu, sementara struktur teks menentukan siapa yang diberi suara dan siapa yang dibisukan. Dalam wacana barak militer, ideologi seperti militerisme sipil, populisme moral, dan otoritarianisme terselubung beroperasi melalui *framing* yang tampak netral tetapi sarat kepentingan politik.

Representasi menjadi konsep kunci dalam pembentukan makna wacana. Representasi tidak sekadar refleksi realitas, tetapi konstruksi makna melalui bahasa dan simbol (Hall, 1997). Media berperan besar dalam membentuk cara masyarakat memandang kelompok sosial tertentu melalui pelabelan, penonjolan, atau penghilangan aspek tertentu. Dalam wacana barak militer, anak muda dapat direpresentasikan sebagai masalah sosial yang membutuhkan disiplin, masyarakat bawah sebagai pihak pasif yang harus diarahkan, sementara aktor politik seperti KDM dibingkai sebagai penyelamat moral atau figur populis. Representasi semacam ini bekerja sebagai aparatus ideologis yang menormalisasi relasi kuasa tertentu dan membentuk persepsi publik terhadap kelompok sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma interpretatif untuk memahami proses pembentukan ideologi dan representasi sosial dalam wacana barak militer. Pendekatan itu dipilih karena bersifat fleksibel, kontekstual, serta memungkinkan peneliti menafsirkan makna-makna tersembunyi dan relasi kuasa yang bekerja dalam

praktik diskursif (Moleong, 2016; Sugiyono, 2019). Penelitian bersifat deskriptif, yakni menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual tanpa mencari hubungan kausal, sebagaimana ditegaskan Nazir (2013), Sugiyono (2019), dan Arikunto (2013) bahwa penelitian deskriptif sangat relevan untuk menggali data wacana dalam konteks penelitian kualitatif. Sumber data penelitian mencakup teks berita dan laporan tentang barak militer yang dimuat pada Mei 2025 di media daring *BBC News Indonesia*, *Okezone News*, *Tempo.co*, *Kompas.com*, dan *Jawa Pos*. Media itu dipilih karena kredibilitas serta kemampuannya merepresentasikan ragam posisi ideologis dalam diskursus publik.

Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan menerapkan teknik simak dan catat (Sudaryanto, 2015). Peneliti menyimak teks secara cermat untuk mengidentifikasi aspek kebahasaan, lalu mencatat dan mengklasifikasikannya berdasarkan fokus penelitian. Instrumen utama adalah peneliti sendiri karena penelitian kebahasaan menuntut sensitivitas teoretis dan analitis. Untuk menjaga keaslian data, digunakan alat bantu teknis berupa catatan observasi dan tangkapan layar.

Analisis data dilakukan secara induktif mengikuti model AWK tiga dimensi Fairclough, yaitu analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Tahap analisis teks memanfaatkan metode agih untuk mengkaji struktur linguistik, seperti leksikon, sintaksis, modalitas, dan metafora (Sudaryanto, 2015). Pada tahap praktik wacana dan praktik sosial digunakan metode padan untuk menautkan teks dengan konteks produksi dan konsumsi wacana, termasuk relasi sosial dan ideologi yang melingkupinya (Sutopo, 2002). Hasil analisis disajikan dengan teknik informal, yaitu uraian verbal yang argumentatif dan komunikatif (Mahsun, 2006).

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima media membingkai wacana barak militer dengan strategi linguistik, ideologi, dan representasi sosial yang berbeda sesuai dengan orientasi masing-masing. Pada level struktur linguistik, media menggunakan labelisasi, eufemisme, negasi, antitesis, modalitas, serta metafora untuk membangun citra tertentu tentang anak, negara (KDM), dan urgensi kebijakan. Label *nakal*, *susah diatur*, dan *dibina* pada *BBC News Indonesia* dan *Jawa Pos* menempatkan anak sebagai objek moral, sementara eufemisme *pembinaan* menutupi sifat koersif kebijakan. Pada sisi lain, struktur antitesis (*bukan hukuman, tetapi penyelamatan*) dipakai untuk melegitimasi pendekatan disipliner, sedangkan modalitas kemungkinan pada *BBC News Indonesia*, *Tempo.co*, dan *Okezone News* membuka ruang kritik terhadap kebijakan tersebut. Media juga memakai metafora moral, krisis, dan hiperbola untuk memperkuat frame kedaruratan dan pembenaran tindakan keras.

Pada sisi ideologi, ditemukan adanya benturan kepentingan simbolik. *BBC News Indonesia* mengusung ideologi humanistik-liberal yang menolak pendekatan koersif dan menempatkan anak sebagai subjek hak. *Okezone News* lebih menampilkan ideologi tekno-birokratis dengan fokus pada evaluasi administratif dan profesionalitas. *Tempo.co* menghadirkan ideologi perlindungan anak yang kritis terhadap kekuasaan. *Kompas.com* membingkai KDM sebagai figur moral paternalistik dengan narasi empati dan penyelamatan, sedangkan *Jawa Pos* mengedepankan ideologi disiplin-ekonomistik yang menjadikan barak sebagai jalur produktivitas dan ketertiban sosial.

Pada perspektif representasi sosial, media membangun gambaran yang kontras mengenai anak dan KDM. *BBC News Indonesia*, *Tempo.co*, dan *Okezone News* cenderung menampilkan anak sebagai korban yang rentan, produk sistem pendidikan yang gagal melindungi mereka, sehingga membutuhkan pendekatan rehabilitatif, bukan militeristik. Sebaliknya, *Kompas.com* dan *Jawa Pos* menggambarkan anak sebagai subjek moral yang

harus diarahkan dan dibina demi ketertiban sosial. Representasi terhadap KDM pun beragam. *Kompas.com* dan *Jawa Pos* menempatkannya sebagai “ayah bangsa” yang bertindak demi kebaikan, sementara *BBC News Indonesia*, *Tempo.co*, dan *Okezone News* melihatnya sebagai figur ambigu yang memiliki tujuan baik tetapi memakai cara yang menimbulkan potensi penyalahgunaan kuasa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa wacana “barak militer” menjadi arena pertarungan ideologi antara humanisme, teknokrasi, moralitas paternalistik, dan disiplin produktivistik. Melalui strategi linguistik tertentu, media membentuk makna sosial tentang anak, KDM (negara), dan ketertiban, sehingga kebijakan KDM tidak hanya dipahami sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai praktik representasi, legitimasi kekuasaan, serta produksi nilai-nilai moral dalam ruang publik.

Pembahasan

Struktur Linguistik dan Retoris yang Membingklai Wacana Barak Militer

Struktur linguistik dalam teks berita mencerminkan bagaimana bahasa digunakan untuk memposisikan aktor sosial (anak, pemerintah, KPAI, dan masyarakat). Fairclough (2001) menegaskan bahwa pilihan leksikal dan gramatikal merupakan tindakan ideologis karena melalui bahasa suatu pihak bisa ditinggikan atau direndahkan.

Labelisasi dan Eufemisme sebagai Mekanisme Kuasa Simbolik

Labelisasi dan eufemisme menjadi salah satu strategi linguistik dalam wacana barak militer. *BBC News Indonesia* dan *Jawa Pos* menggunakan diksi *nakal*, *susah diatur*, dan *dibina* untuk menandai kelompok anak yang dikirim ke barak militer. Diksi itu tampak sederhana tetapi sarat makna ideologis. Setiap pilihan leksikal tidak bersifat netral. Bahasa menjadi bentuk tindakan sosial yang merefleksikan dan mereproduksi relasi kuasa. Dengan demikian, diksi *anak nakal* tidak sekadar deskripsi perilaku, tetapi label sosial yang menstigma individu atau kelompok tertentu sebagai pihak bermasalah yang pantas “ditangani” secara keras.

Labelisasi bekerja sebagai mekanisme simbolik untuk mengonstruksi hierarki moral antara “yang baik” dan “yang salah.” Ketika disebut “nakal” atau “susah diatur,” secara implisit seorang anak ditempatkan di posisi inferior yang membutuhkan intervensi eksternal dari pihak berwenang. Melalui diksi semacam itu, media turut memperkuat wacana dominan bahwa ketertiban sosial harus dijaga dengan cara disiplin dan hukuman. Praktik semacam itu merupakan bentuk hegemoni ideologis yang menjadikan masyarakat menerima tatanan kuasa tertentu (otoritas negara terhadap anak) sebagai sesuatu yang wajar dan sah (Fairclough, 2001).

Selain labelisasi, terdapat eufemisme yang melunakkan tindakan koersif agar tampak manusiawi atau bermoral. Diksi *dibina* atau *dididik* di barak militer secara retoris menyamarkan realitas kekerasan simbolik dan disiplin fisik yang mungkin dialami anak. Eufemisme merupakan bentuk strategi diskursif untuk menaturalisasi kekuasaan, yakni membuat tindakan represif tampak sebagai bagian dari kepedulian sosial. Dengan menyebut hukuman sebagai “pembinaan”, wacana ini menutupi ketimpangan relasi antara penguasa (negara atau aparat militer) dan anak sebagai warga yang rentan.

Klausa *pelajar yang dicap “nakal” dikirim ke barak militer* (D-1, *BBC*) menjadi contoh konkret struktur linguistik memperkuat relasi kuasa. Kalimat pasif dengan fokus pada objek (*pelajar*) menjadikan anak sebagai penerima tindakan, bukan pelaku atau subjek yang memiliki kehendak dan hak. Struktur itu menunjukkan bagaimana kuasa direpresentasikan secara implisit, yaitu ketika agen pelaku (pemerintah/KDM) dihapus

dari struktur kalimat, sehingga tindakan koersif tampak netral atau bahkan positif (Fairclough, 1992).

Praktik labelisasi dan eufemisme berimplikasi terhadap cara masyarakat memaknai kenakalan remaja dan pendidikan. Ia menggeser fokus dari persoalan sosial yang kompleks menjadi persoalan moral individu yang harus dikendalikan. Dalam konteks inilah, bahasa berfungsi sebagai alat ideologis untuk mendisiplinkan tubuh dan pikiran anak. Media yang mengulang diksi *nakal* dan *perlu dibina* sebenarnya sedang memperkuat konstruksi sosial bahwa ketertibian harus dicapai melalui ketaatan, bukan dialog atau pemberdayaan. Dengan demikian, praktik labelisasi dan eufemisme bukan hanya fenomena linguistik, tetapi juga refleksi dari struktur sosial yang lebih besar, yaitu upaya negara dan media meneguhkan kontrol atas generasi muda melalui bahasa.

Struktur Kontras dan Negasi sebagai Strategi Legitimasi

Struktur kontras dan negasi muncul secara konsisten dalam teks berita sebagai strategi retorik yang kuat untuk membingkai makna kebijakan. Diksi "*alih-alih menjadi tidak 'nakal'...*" (D-2, BBC), "*bukan hukuman, ini penyelamatan,*" (D-5, BBC) dan "*masuk barak bukan berarti anak itu nakal*" (D-40, JP) berfungsi sebagai perangkat argumentatif yang menghadirkan oposisi nilai, antara niat baik dan potensi dampak, antara pembinaan dan hukuman, atau antara perlindungan dan represi. Strategi itu merupakan bentuk interdiskursivitas antara moral, politik, dan pedagogis untuk melegitimasi tindakan. Kontras dan negasi menjadi cara untuk merumuskan pembenaran sambil menetralkan kritik (Fairclough, 2010).

Secara linguistik, konstruksi antitetik (A bukan B, melainkan C) melakukan dua pekerjaan sekaligus. Pertama, mengakui kemungkinan interpretasi negatif (barak adalah hukuman). Pengakuan itu menciptakan kesan keterbukaan atau kejujuran narator. Kedua, melalui klausa tandingan, mengalihkan makna ke interpretasi yang menguntungkan pembuat kebijakan (barak adalah penyelamatan atau pembinaan). Kalimat "*Kalau orang tua sudah menyerah, maka negara harus hadir. Ini bukan hukuman, ini penyelamatan.*" (D-5, BBC) menunjukkan pola tersebut. Pengakuan atas problem (orang tua menyerah) diikuti oleh antitesis yang menegaskan nilai moral tindakan negara. Strategi itu efektif merasionalkan tindakan koersif karena mengemas kewenangan sebagai respons etis, bukan dominasi.

Negasi digunakan untuk membentuk batas interpretatif, menentukan apa yang tidak dimaksud sehingga ruang makna publik dikendalikan. Kalimat "*Masuk barak bukan berarti bahwa anak itu nakal.*" (D-40, JP) berfungsi sebagai upaya *reframing*, upaya menolak label patologis lalu menawarkan pembacaan alternatif yang lebih netral atau positif (pembinaan). Namun, meskipun tampak membela anak dengan menolak stigma, operasi retorik ini sekaligus mempertahankan legitimasi intervensi karena mengganti label negatif dengan label yang secara moral dapat diterima. Teknik itu seringkali menutupi relasi kuasa yang sebenarnya, negasi mereduksi resistensi moral terhadap tindakan negara tanpa mengubah praktik substansialnya (Fairclough, 2001).

Struktur negasi dan klausa kontradiktif dipakai oleh pihak kritis untuk mengungkap inkonsistensi atau batas kemampuan kebijakan, misalnya "*Alih-alih menjadi tidak 'nakal', anak-anak itu justru dikhawatirkan mempelajari nilai-nilai yang tidak cocok dengan usianya...*" (D-2, BBC) dan "*Psikolog: Mengubah perilaku remaja 'nakal' tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat hanya 14 hari.*" (D-8, BBC). Negasi berfungsi sebagai alat argumentatif untuk menunjuk pada kegagalan pragmatis dan etis kebijakan, menolak klaim efektivitas dengan dasar ilmiah atau empiris. Hal itu merupakan bentuk wacana

tandingan (*counter-discourse*) yang mencoba membuka ruang diskursif alternatif dari pendekatan koersif ke pendekatan berbasis hak dan ilmu pengetahuan.

Pola kontras sering dipasangkan dengan strategi mitigasi (*hedging*) dan modalitas untuk mengelola tanggung jawab retorik. Penggunaan frasa kondisional “*kalau orang tua sudah menyerah...*” atau kata-kata yang melembutkan seperti *dikhawatirkan* dan *bisa-bisa* (D-9, BBC) menempatkan klaim pada domain kemungkinan, sehingga klaim pembenaran tidak tampak absolut. Hal itu berimplikasi pada bagaimana publik menilai kewajaran tindakan. Pembuat wacana tampak sadar adanya risiko, tetapi tetap menolak tuduhan represif dengan menampilkan tindakan sebagai pilihan terakhir atau respons darurat. Secara taktis, kombinasi antitesis—*hedging*—modalitas menciptakan wacana yang tampak bertanggung jawab sekaligus mempertahankan otoritas.

Dari perspektif praktik sosial, penggunaan kontras dan negasi berfungsi untuk mengelola legitimasi kebijakan di ruang publik. Ketika menggunakan antitesis untuk menyatakan “*bukan hukuman tetapi penyelamatan*”, pemerintah/difusi media sedang membangun narasi legitimasi moral yang menempatkan tindakan koersif dalam kerangka tanggung jawab sosial. Sebaliknya, ketika memakai negasi untuk menolak klaim efektivitas kebijakan, aktor kritis menantang legitimasi itu dengan menuntut bukti dan prosedur etis. Pertarungan antara kedua wacana ini memperlihatkan bahwa bahasa bukan sekadar cerminan perdebatan, melainkan pembentuk batas apa yang dapat dipikirkan dan dikatakan tentang pendidikan, disiplin, dan hak anak.

Pilihan Leksikal Formal dan Teknis sebagai Bentuk Rasionalisasi Kebijakan

Okezone News dan *Tempo.co* menggunakan struktur kalimat yang formal dan terminologi birokratis, seperti *standar baku*, *asesmen psikolog profesional*, dan *child safeguarding*. Pilihan leksikal itu tidak sekadar menunjukkan preferensi gaya penulisan, tetapi juga mencerminkan ideologi tertentu yang melekat dalam praktik diskursif media tersebut, yakni ideologi teknokratis yang mengandalkan legitimasi ilmiah dan rasionalitas kebijakan. Dengan menggunakan istilah teknis dan ilmiah, kedua media berupaya membingkai isu barak militer dalam koridor kebijakan berbasis prosedur dan keahlian, bukan semata dalam wilayah moralitas atau emosi publik. Bentuk leksikal seperti itu merupakan bagian dari strategi rasionalisasi diskursif, kekuasaan disamarkan di balik bahasa yang tampak objektif dan profesional (Fairclough, 1992). Gaya teknokratik menampilkan jarak antara pembuat kebijakan dan masyarakat awam, sekaligus membangun kesan bahwa kebijakan publik hanya dapat dipahami melalui bahasa keahlian. Dalam konteks ini, *Okezone News* dan *Tempo.co* tidak memosisikan diri sebagai pengkritik keras kebijakan, tetapi sebagai mediator epistemik yang mengedepankan rasionalitas prosedural. Artinya, yang dipersoalkan bukan moralitas kebijakan, melainkan kualitas teknis dan implementatifnya.

Diksi *asesmen psikolog profesional* berfungsi membangun kesan adanya otoritas ilmiah yang netral, yang dipercaya mampu menentukan kelayakan penerapan kebijakan terhadap anak-anak. Penggunaan bentuk nominalisasi (*asesmen*, *standar*, *perlindungan anak*) mengaburkan agen pelaku (siapa yang menetapkan standar atau siapa yang berhak menilai) sehingga menciptakan efek impersonal. Praktik itu disebut teknik depersonalisasi kekuasaan, yakni peleburan tanggung jawab politik ke dalam sistem atau prosedur yang tampak objektif. Kebijakan tidak lagi dipersepsi sebagai tindakan politis, tetapi sebagai hasil mekanisme rasional yang “tidak bisa disalahkan”.

Bahasa ilmiah yang digunakan kedua media juga memperkuat kesan bahwa perlindungan anak adalah urusan sistem, bukan empati. Ketika media menulis “*standar baku yang mengatur keterlibatan personel militer dalam program pendidikan*” (D-15, ON),

wacana perlindungan anak direduksi menjadi persoalan administratif dan regulatif. Dengan cara itu, isu kemanusiaan yang seharusnya menuntut sensitivitas emosional (seperti hak anak atas lingkungan pendidikan yang aman dan non-kekerasan) justru diartikulasikan dalam bahasa kebijakan yang dingin dan terukur. Hal itu memperlihatkan bentuk de-emosionalisasi diskursus, nilai-nilai humanistik dikalahkan oleh nilai-nilai teknokratik dan manajerial.

Pada sisi lain, gaya formal-birokratis juga berfungsi sebagai strategi legitimasi alternatif yang berlawanan dengan gaya populistik KDM maupun gaya moralistik media pro-pemerintah. *Okezone News* dan *Tempo.co* mencoba mengembalikan isu barak militer ke ranah prosedural dan professional. Perlindungan anak bukan sekadar niat baik, tetapi memerlukan rencana berbasis data, supervisi ahli, dan standar yang terukur. Dengan cara itu, media tersebut menegaskan posisi ideologisnya sebagai penjaga rasionalitas publik, yang menilai kebijakan bukan dari niat politisnya, melainkan dari kesesuaiannya dengan prinsip ilmiah dan hak anak. Hal itu mencerminkan praktik rekontekstualisasi teknokratis, yakni memasukkan wacana sosial ke dalam kerangka kebijakan yang sarat istilah teknis untuk menciptakan legitimasi baru (Fairclough, 2010). Rekontekstualisasi ini menggeser makna sosial dari perlindungan anak menjadi pengelolaan risiko sosial. Wacana kemanusiaan diolah menjadi wacana administrasi yang dapat diukur, diaudit, dan dipertanggungjawabkan secara teknis. Dengan demikian, gaya formal-birokratis pada *Okezone News* dan *Tempo.co* berperan ganda, pada satu sisi menegaskan profesionalisme dan objektivitas media, pada sisi lain, menandai transformasi nilai-nilai sosial menjadi bahasa prosedural, empati digantikan oleh efisiensi dan pengendalian. Wacana ilmiah menjadi alat hegemoni halus yang mengatur cara publik memahami “perlindungan anak” dalam logika rasional negara modern, bukan lagi sebagai hak moral yang harus diperjuangkan secara emosional.

Metafora dan Hiperbola sebagai Pembentuk Persepsi Moral dan Krisis

Penggunaan metafora dan hiperbola merupakan strategi retorik untuk membentuk persepsi publik. Bahasa figuratif tidak hanya memperindah teks, tetapi berfungsi menstrukturkan cara berpikir dan merasakan (Fairclough, 1992). Dengan metafora, abstraksi sosial seperti *pendidikan*, *kenakalan*, dan *pembinaan* dipahami melalui citra konkret yang emosional. Sementara itu, hiperbola menajamkan efek retorik dengan meningkatkan intensitas makna sehingga memengaruhi sikap moral pembaca. Dalam konteks ini, media yang pro maupun yang kontra sama-sama menggunakan metafora dan hiperbola untuk membingkai realitas dan membangun legitimasi atau delegitimasi kebijakan.

Metafora moral-religius tampak dalam teks *Kompas.com*, seperti pernyataan KDM “*Saya merasa berdosa jika tidak bisa menyelamatkan anak-anak itu*” (D-33, Kc). Kalimat itu bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan sebuah konstruksi moral yang memindahkan isu kebijakan publik ke ranah spiritualitas individu. Metafora itu bekerja pada level ideologis dengan menyucikan tindakan politik melalui bingkai moralitas (Fairclough, 2003b). Dengan kata lain, tindakan koersif terhadap anak ditransformasikan menjadi tindakan penyelamatan jiwa, bukan lagi tindakan administratif atau politis.

Melalui metafora “penyelamatan”, KDM diposisikan sebagai figur ayah yang bertanggung jawab atas moralitas generasi muda. Hal itu sejalan dengan ideologi paternalistik dalam budaya politik Indonesia, pemimpin dipandang sebagai pengasuh yang berhak menegur dan membina “anak-anak bangsa.” Metafora itu memperlihatkan bagaimana identitas sosial dan relasi kuasa dibentuk melalui bahasa. Pemimpin ditempatkan sebagai subjek aktif penyelamat, sementara anak-anak ditempatkan sebagai

objek pasif yang harus diselamatkan (Fairclough, 1995). Dengan demikian, metafora religius berfungsi ganda, yaitu mengangkat citra moral pemimpin dan sekaligus menjustifikasi tindakan keras sebagai wujud cinta kasih.

Metafora Krisis dan Ancaman: “Generasi Rusak” dan “Darurat Moral”

Media pro maupun kontra barak militer memanfaatkan metafora krisis untuk memperkuat urgensi tindakan. Konsep “generasi rusak” dan “darurat moral” berfungsi menciptakan citra situasi ekstrem yang menuntut solusi drastis. Metafora krisis merupakan perangkat ideologis yang digunakan untuk melegitimasi intervensi negara karena menempatkan publik dalam kerangka “keadaan darurat” yang memungkinkan tindakan luar biasa menjadi wajar (Fairclough, 2001). Dalam *Jawa Pos* dan *Kompas.com*, metafora tersebut digunakan untuk membangun justifikasi moral atas langkah militerisasi pendidikan. Anak tidak lagi dilihat sebagai individu yang bermasalah, tetapi simbol dari generasi yang “terancam rusak” jika tidak segera ditangani. Dengan demikian, kebijakan keras tampil sebagai bentuk “penyelamatan bangsa”. Dalam praktik diskursif semacam ini, media berperan bukan hanya sebagai pelapor, melainkan sebagai reproduktor wacana ideologis yang menormalisasi pandangan bahwa kekerasan simbolik dapat dibenarkan demi kebaikan bersama.

Hiperbola sebagai Penguat Emosi dan Polarisasi Makna

BBC News Indonesia memanfaatkan hiperbola untuk menggugah empati dan menyoroti eksekusi kebijakan. Kalimat “*Anak-anak itu justru dikhawatirkan mempelajari nilai-nilai yang tidak cocok dengan usianya*” (D-2, *BBC*) menggunakan intensifikasi bahasa untuk memperlihatkan ketimpangan antara niat baik dan dampak potensial. Hiperbola dalam konteks ini bukan sekadar pembesaran, tetapi berfungsi untuk mendelegitimasi moral kebijakan, menunjukkan bahwa tindakan yang diklaim sebagai penyelamatan justru berpotensi menjadi kekerasan baru. Intensifikasi leksikal itu menandakan sikap evaluatif jurnalis terhadap isu yang diberitakan. Ia membentuk modalitas evaluatif yang secara halus mengarahkan pembaca untuk menilai tindakan pemerintah sebagai berlebihan, tidak proporsional, atau bahkan kontraproduktif (Fairclough, 1992). Dengan demikian, hiperbola menjadi perangkat ideologis bagi media kritis untuk mendesak pembaca merefleksikan kontradiksi antara tujuan moral dan praktik koersif.

Interdiskursivitas antara Wacana Moral, Politik, dan Nasionalisme

Metafora religius dan hiperbola krisis menunjukkan adanya interdiskursivitas, yakni tumpang tindih antara wacana moral, politik, dan nasionalisme. Dalam *Kompas.com* dan *Jawa Pos*, wacana moralitas digabungkan dengan wacana kebangsaan. Wacana “*menyelamatkan generasi muda agar siap menghadapi dunia industri*” (D-42, *JP*) menggabungkan nilai moral dengan produktivitas ekonomi. Sebaliknya, *BBC News Indonesia* dan *Tempo.co* memadukan wacana hak anak dengan wacana kemanusiaan universal, membingkai kebijakan ini sebagai bentuk pelanggaran etis terhadap hak dasar manusia. Perpaduan antarwacana ini menunjukkan bagaimana ideologi bekerja di level semiotik, bukan hanya melalui isi teks, tetapi melalui cara-cara penggabungan dan pembedaan simbolik. Dengan menggunakan metafora yang sama (*penyelamatan, krisis, pembinaan*), setiap media justru mengarahkan makna yang berbeda, satu melanggengkan otoritas dan satu menantanginya. Wacana menjadi arena pertarungan ideologis yang menentukan “apa yang tampak masuk akal dan bermoral” dalam konteks sosial tertentu (Fairclough, 2003b).

Modalitas sebagai Strategi Persuasi dalam Konstruksi Legitimasi

Modalitas merupakan cara penutur mengekspresikan tingkat keyakinan, kewajiban, atau kemungkinan terhadap suatu proposisi (Fairclough, 1992, 2010). Modalitas menjadi indikator penting dari posisi ideologis dan relasi kuasa dalam teks. Melalui bentuk modalitas keharusan (*harus*), kemungkinan (*bisa jadi*), atau kepastian (*pasti, tentu*), media membangun modus evaluatif yang tidak netral. Modalitas bekerja sebagai strategi persuasi yang menegaskan atau menolak legitimasi suatu kebijakan. Dalam konteks barak militer, media massa menggunakan modalitas dengan intensitas dan arah yang berbeda, membentuk dua kutub ideologis, legitimasi moral dan politik versus delegitimasi humanistik dan rasional.

Jawa Pos dan *Kompas.com* menampilkan modalitas kepastian dan keharusan yang memperkuat legitimasi kebijakan. Kalimat "*Sekolah kejuruan itu harus tertib pakai bajunya, harus pendidikan militer ini harus masukin barak ini*" (D-41, JP) menampilkan tuturan imperatif yang tegas, diulang hingga tiga kali, untuk memperkuat kesan otoritas moral yang tidak bisa ditawar. Penggunaan kata *harus* tidak hanya menandai kewajiban formal, tetapi juga menyiratkan kebutuhan moral bahwa tindakan disipliner dianggap mutlak demi kebaikan bersama. Modalitas itu menandakan kekuatan di balik wacana, yaitu kekuatan sosial dan institusional yang menuntut kepatuhan melalui legitimasi moral. Dengan demikian, wacana *Jawa Pos* tidak hanya melaporkan fakta, tetapi ikut memperkuat pandangan dunia bahwa disiplin dan ketertiban merupakan nilai utama dalam pembentukan karakter bangsa. Sementara itu, *Kompas.com* menggunakan modalitas keharusan dalam kerangka moral. Pernyataan "*gubernur harus memberikan jalan meskipun jalan itu darurat*" (D-31, Kc) menampilkan semangat tanggung jawab pemimpin yang tidak boleh diam di tengah krisis sosial. Kata *harus* bukan perintah koersif, melainkan seruan etis yang memperkuat citra pemerintah sebagai aktor moral yang bertindak karena nurani. Modalitas kepastian juga muncul melalui diksi "*ini bukan hukuman, ini penyelamatan*" (D-5, BBC). Struktur antitesis dan modalitas deklaratif menunjukkan keyakinan penuh terhadap moralitas kebijakan. Dalam hal ini, wacana legitimasi dibangun melalui kontradiksi yang menenangkan, tindakan keras diubah maknanya menjadi kasih sayang. Secara ideologis, bentuk modalitas ini menciptakan efek naturalisasi, kebijakan militerisasi pendidikan diterima sebagai tindakan moral yang wajar dan perlu.

BBC News Indonesia, *Tempo.co*, dan *Okezone News* menggunakan modalitas kemungkinan dan ketidakpastian untuk mendesak refleksi kritis terhadap klaim kebenaran negara. Kalimat "*Alih-alih menjadi tidak 'nakal', anak-anak itu justru dikhawatirkan mempelajari nilai-nilai yang tidak cocok dengan usianya*" (D-2, BBC) menunjukkan penggunaan modalitas epistemik (*dikhawatirkan*) yang menyiratkan adanya keraguan terhadap efektivitas program. Bentuk modalitas seperti itu berfungsi sebagai perangkat linguistik untuk menjaga jarak kritis antara jurnalis dan wacana kekuasaan.

Dalam pernyataan "*Kalau semua masalah solusinya ke barak, bisa-bisa pelajar itu kena masalah mental*" (D-9, BBC), modalitas probabilitas *bisa-bisa* menciptakan efek skeptis yang kuat terhadap generalisasi kebijakan. *BBC* memanfaatkan modalitas ini sebagai strategi delegitimasi moral, menggiring pembaca untuk mempertanyakan logika di balik kebijakan yang tampak berlebihan. Media ini memosisikan dirinya sebagai suara rasional yang mewakili pandangan ilmiah dan empatik terhadap anak, berlawanan dengan otoritas moral yang diklaim pemerintah.

Bentuk serupa juga ditemukan pada berita *Tempo.co*, "*tidak semua pembina memahami prinsip dasar perlindungan anak*" (D-26, Tc). Struktur ini mengandung modalitas parsial

(tidak semua) yang berfungsi sebagai kritik halus tetapi sistematis. Ia tidak menuduh secara frontal, tetapi membuka ruang kesadaran bahwa kebijakan yang ideal sekalipun memiliki cacat struktural. Dalam kerangka ideologis, modalitas seperti ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Selain melalui bentuk modalitas, persuasi juga dibangun melalui strategi retorik seperti antitesis, ajakan kolaboratif, dan rasionalisasi teknokratik. Dalam wacana *Kompas.com*, penggunaan ajakan seperti “*Mari kita bergandengan tangan untuk melindungi anak Indonesia*” (D-34, Kc) menandakan perubahan strategi persuasi dari dominasi ke kolaborasi. Bentuk imperatif sopan (*mari kita...*) berfungsi meredakan resistensi publik dan menampilkan citra negara sebagai mitra moral masyarakat, bukan pengendali. Fairclough (2003a) menyebut strategi ini sebagai modalitas relasional (*relational modality*), bentuk bahasa yang digunakan untuk mengatur hubungan sosial antara pembicara dan pendengar. Sementara itu, *Okezone News* memakai strategi rasionalisasi melalui gaya bahasa formal dan evaluatif. Kalimat “*Evaluasi perlu dilakukan untuk merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak*” (D-13, ON) menunjukkan persuasi berbasis keilmuan, bukan emosi. Media ini menggunakan logika teknokratik untuk menekankan pentingnya standar, asesmen, dan profesionalisme dalam kebijakan publik. Dengan demikian, *Okezone News* tidak serta-merta menolak program KDM, tetapi mendorong legitimasi baru yang berbasis rasionalitas dan regulasi.

Dalam semua kasus tersebut, strategi persuasi berfungsi membentuk relasi kuasa simbolik antara negara, media, dan masyarakat. *BBC News Indonesia* dan *Tempo.co* mengajak pembaca berpikir kritis dan empatik. *Kompas.com* dan *Jawa Pos* mengajak pembaca percaya dan bersatu. *Okezone News* mengajak pembaca bersikap rasional dan berhati-hati. Setiap strategi mengandung ideologi yang berbeda, tetapi semuanya beroperasi melalui konstruksi bahasa yang menata kemungkinan berpikir publik.

Ideologi yang Tecermin

Ideologi bekerja melalui bahasa secara implisit. Ia menaturalisasi relasi kuasa tertentu agar tampak wajar. Setiap media mengusung ideologi yang berbeda sesuai posisi dan gaya pemberitaannya. *BBC News Indonesia* menampilkan ideologi kritis dan humanistik yang menolak pendekatan koersif maupun militeristik dalam menangani persoalan sosial anak. Melalui pilihan leksikal dan struktur narasi yang menyoroti aspek hak asasi dan perlindungan anak, media ini menempatkan diri sebagai media yang berpihak pada nilai-nilai empati, kebebasan, dan rasionalitas. Wacana “*Anak-anak justru dikhawatirkan mempelajari nilai-nilai yang tidak cocok dengan usianya*” (D-2, BBC) merepresentasikan posisi ideologis ini. Anak digambarkan bukan sebagai subjek yang perlu dikendalikan dengan disiplin militer, melainkan sebagai korban dari kebijakan yang melampaui batas usia dan kapasitas psikologis mereka. Wacana tersebut mengandung semangat liberal-humanistik, yang menuntut bahwa kebijakan pemerintah harus diuji melalui rasionalitas publik dan prinsip moral yang mengutamakan kesejahteraan warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Dengan demikian, *BBC* tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi posisi moral terhadap kebijakan KDM yang dianggap terlalu mengedepankan kedisiplinan dan penyeragaman ala militer. Hal itu menunjukkan bagaimana *BBC* menjalankan fungsi kritik sosial global terhadap praktik kekuasaan yang bersifat otoriter dalam konteks lokal Indonesia. Dengan menyoroti dampak psikologis dan nilai-nilai yang tidak sesuai usia anak, media ini mengartikulasikan wacana yang menegaskan pentingnya pendidikan berbasis empati dan non-kekerasan. Wacana *BBC*

dapat dibaca sebagai bentuk rekontekstualisasi nilai-nilai internasional tentang perlindungan anak ke dalam konteks kebijakan lokal, sehingga membuka ruang perdebatan yang lebih reflektif dan etis mengenai batas intervensi negara terhadap moralitas anak.

Okezone News menampilkan ideologi tekno-birokratis dan reformis. Ideologi rasional-birokratis menekankan pentingnya tata kelola kebijakan yang terukur, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Melalui narasi "*program perlu dievaluasi secara menyeluruh*" (D-12, ON), *Okezone* menggeser fokus wacana dari moralitas dan emosi menuju rasionalitas kebijakan. Bahasa yang digunakan cenderung formal dan teknokratik, dengan istilah seperti *standar baku* (D-15, ON) dan *asesmen psikolog profesional* (D-17, ON). Diksi itu memperlihatkan orientasi terhadap nilai-nilai efisiensi, akuntabilitas, dan objektivitas, yang merupakan ciri khas ideologi birokratik dalam praktik jurnalisme modern. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa *Okezone* tidak menilai kebijakan barak militer KDM dari sisi moral atau emosional, tetapi dari aspek kelayakan administratif dan profesionalitas pelaksanaan program. Dengan cara itu, media ini memosisikan diri sebagai aktor rasional dalam ruang publik yang berperan menyeimbangkan antara kebijakan pemerintah dan standar tata kelola yang baik (*good governance*). Penekanan pada kebutuhan evaluasi juga menunjukkan upaya media untuk memperkuat prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan kebijakan publik, yang menekankan bahwa keputusan harus didasarkan pada kajian empiris, bukan pada preferensi pribadi atau simbolik.

Lebih jauh, wacana *Okezone* mencerminkan ideologi teknokrasi modern yang berakar pada logika administrasi rasional Weberian, yaitu keyakinan bahwa setiap kebijakan publik harus diukur melalui prosedur formal dan keilmuan profesional. Dengan menampilkan suara psikolog, pakar pendidikan, dan pejabat pemerintah, *Okezone* menciptakan konstruksi diskursif bahwa solusi atas masalah sosial tidak boleh direspon dengan pendekatan karismatik atau militeristik, tetapi dengan sistem kebijakan berbasis data dan akuntabilitas publik. Praktik wacana ini menunjukkan pergeseran dari *discourse of morality* menuju *discourse of governance*, otoritas moral digantikan oleh otoritas administratif dan keilmuan.

Tempo.co mengusung ideologi hak anak dan etika sosial. Ideologi ini menekankan humanisme kritis dan perlindungan anak, menonjolkan ketimpangan kekuasaan antara negara dan anak. Kata *ancaman*, *tidak betah*, dan *tidak tahu alasan dikirim* menggambarkan anak sebagai subjek yang tidak berdaya dalam sistem yang represif. Dengan cara ini, *Tempo* memproduksi wacana alternatif yang melawan legitimasi moral kebijakan KDM.

Berbeda dari media lain, *Kompas.com* menampilkan ideologi paternalistik-moral dan kolaboratif. KDM ditampilkan sebagai figur moral dan empatik. Diksi *merasa berdosa* (D-33, Kc) dan *rasa kemanusiaan* (D-30, Kc) memperkuat narasi paternalistik yang menampilkan pemimpin sebagai "ayah bangsa" yang bertindak demi kasih sayang moral. Namun, ideologi ini juga menyamarkan relasi kuasa yang timpang karena tindakan keras negara dibingkai sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab.

Jawa Pos menunjukkan ideologi disipliner dan ekonomistik (utilitarian) yang mengaitkan pendidikan militer dengan kesiapan industri. Frasa "*agar masuk industri itu meyakinkan*" (D-42, JP) menandakan pandangan instrumentalis terhadap pendidikan. Anak tidak lagi dilihat sebagai subjek moral, tetapi aset ekonomi yang perlu "ditempa." Wacana ini selaras dengan ideologi pembangunan Orde Baru, yang menganggap disiplin dan ketertiban sebagai kunci kemajuan bangsa.

Representasi Sosial dan Nilai-Nilai yang Diusung

Wacana berperan dalam membentuk identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan. Kelima media mengonstruksi peran serta identitas anak dan KDM (negara) dengan cara yang berbeda.

Representasi Anak

Konstruksi wacana tentang anak dalam *BBC News Indonesia*, *Tempo.co*, dan *Okezone News* menunjukkan orientasi yang kuat pada perspektif perlindungan dan hak asasi. Anak digambarkan sebagai korban dari sistem sosial, pendidikan, dan keluarga yang gagal memberikan ruang aman bagi tumbuh kembangnya. Frasa "*Peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru BK.*" (D-17, ON) dan "*Ketiadaan protokol child safeguarding... berisiko terhadap pelanggaran hak anak.*" (D-28, Tc) memperlihatkan bahwa media ini menempatkan anak sebagai pihak yang rentan dan membutuhkan perlindungan, bukan hukuman. Representasi tersebut selaras dengan paradigma modern perlindungan anak yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan psikososial, bukan pendekatan koersif.

Sebaliknya, *Kompas.com* dan *Jawa Pos* menampilkan representasi yang lebih normatif dan moralistik terhadap anak. Dalam kedua media ini, anak diposisikan sebagai subjek moral yang perlu dibina agar kembali ke jalan yang benar dan disiplin. Narasi "*mendidik anak agar sadar dan bertanggung jawab*" dan "*membentuk karakter anak nakal agar berubah*" menunjukkan ideologi paternalistik yang menempatkan orang dewasa, khususnya pemerintah atau figur otoritas, sebagai pembimbing moral. Perspektif ini menegaskan bahwa perilaku anak yang "menyimpang" harus dikoreksi melalui pendidikan disipliner, bukan semata-mata melalui perlindungan hukum atau psikologis.

Dengan demikian, terdapat pergeseran representasi wacana dari pandangan lama tentang "anak bermasalah" menuju konstruksi baru sebagai "anak yang perlu diselamatkan". Pergeseran ini menandai perubahan orientasi ideologis dalam pemberitaan, dari moralitas dan ketertiban sosial menuju empati dan keadilan sosial. Perubahan ini mencerminkan transformasi praktik diskursif media yang turut membentuk kesadaran publik mengenai bagaimana anak dan kenakalan remaja seharusnya dipahami dalam konteks kebijakan dan kemanusiaan.

Representasi Dedi Mulyadi (Negara)

Dalam berita *Kompas.com* dan *Jawa Pos*, figur KDM direpresentasikan secara positif sebagai sosok pembimbing moral, figur ayah, sekaligus pelindung bangsa. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki kepedulian mendalam terhadap masa depan generasi muda, terutama anak-anak yang dianggap "nakal" atau "bermasalah". Narasi "*Dedi ingin menyelamatkan anak-anak dari masa depan suram*" (D-39, JP) dan "*ia merasa berdosa jika tidak mampu menyelesaikan persoalan anak*" (D-33, Kc) menempatkannya sebagai figur paternalistik yang berperan layaknya orang tua bangsa. Representasi ini memperkuat citra Dedi sebagai pemimpin dengan misi moral dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar pejabat administratif. Melalui *framing* semacam ini, media menegaskan legitimasi moral terhadap kebijakan "barak militer" dengan menampilkan niat tulus dan dimensi emosional KDM dalam menjalankan program tersebut.

Sementara itu, *BBC News Indonesia*, *Tempo.co*, dan *Okezone News* menampilkan konstruksi yang lebih kritis dan ambivalen terhadap figur KDM. KDM digambarkan sebagai pemimpin otoriter dan kontroversial. Seseorang dengan niat baik untuk mendidik anak-anak, tetapi menggunakan cara-cara yang problematik. Narasi "*mengirim anak ke barak militer tanpa kajian psikologis*" atau "*metode pendidikan bergaya militer yang*

menuai kritik" menyoroti sisi koersif dari kebijakan KDM. Dengan demikian, wacana yang dibangun bukan sekadar mempertanyakan hasil kebijakan, tetapi juga menantang legitimasi moral di balik tindakan tersebut. KDM dalam wacana ini muncul sebagai figur paradoksal, pada satu sisi berorientasi pada kebaikan sosial, tetapi pada sisi lain memperlihatkan kecenderungan paternalistik dan kontrol sosial yang berlebihan.

Perbandingan antara dua kelompok media ini menunjukkan adanya pertarungan ideologis dalam representasi kepemimpinan KDM. *Kompas.com* dan *Jawa Pos* menormalisasi kekuasaan moral KDM sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sosial, sedangkan *BBC News Indonesia*, *Tempo.co*, dan *Okezone News* mengkritisi relasi kuasa di balik kebijakan yang mengaburkan batas antara perlindungan dan pengekangan. Dalam perspektif AWK, hal itu mencerminkan bagaimana media berperan dalam membingkai figur politik tidak hanya sebagai aktor kebijakan, tetapi juga sebagai simbol ideologis yang memediasi relasi antara negara, masyarakat, dan moralitas publik.

Nilai-nilai yang Diusung

Setiap media dalam berita tentang barak militer menonjolkan nilai-nilai ideologis yang berbeda, yang mencerminkan orientasi dan posisi sosial masing-masing dalam membingkai isu anak, pendidikan, dan kekuasaan. *BBC News Indonesia* dan *Tempo.co* menampilkan nilai-nilai yang berakar pada empati, kebebasan, hak anak, serta demokrasi pendidikan. Kedua media ini menempatkan kebijakan KDM dalam bingkai hak asasi manusia dan etika perlindungan anak, dengan menekankan pentingnya pendekatan yang partisipatif dan non-represif. Narasi mereka mendorong pembaca untuk mempertanyakan praktik pendidikan yang mengabaikan otonomi anak dan cenderung mengutamakan kontrol sosial. Dengan demikian, nilai-nilai yang diusung oleh *BBC News Indonesia* dan *Tempo.co* berorientasi pada humanisme progresif, menolak pendekatan militeristik, dan menegaskan pentingnya kebebasan individu dalam proses pendidikan dan pembinaan sosial.

Okezone News mengedepankan nilai profesionalisme, rasionalitas, dan akuntabilitas publik. Pemberitaan *Okezone* menekankan perlunya kebijakan yang berbasis data, evaluasi, dan standar operasional yang jelas. Diksi *asesmen psikolog profesional* (D-17, ON) dan *evaluasi menyeluruh* (D-12, ON) menunjukkan upaya menggeser wacana dari ranah moral ke ranah administratif dan teknokratik. Pendekatan ini mencerminkan ideologi rasional-birokratis yang memandang masalah sosial sebagai sesuatu yang dapat diatasi melalui sistem, prosedur, dan tanggung jawab kelembagaan, bukan semata-mata melalui niat baik individu.

Kompas.com membingkai isu ini dengan menonjolkan nilai tanggung jawab moral, kemanusiaan, dan kolaborasi sosial. Dalam narasinya, KDM digambarkan sebagai sosok yang memiliki niat tulus untuk memperbaiki moralitas generasi muda melalui pendekatan empatik dan gotong royong. Nilai-nilai yang diangkat *Kompas* sejalan dengan ideologi moral-humanistik yang menekankan keseimbangan antara disiplin dan kasih sayang, serta antara tindakan individu dan tanggung jawab kolektif masyarakat.

Sementara itu, *Jawa Pos* mengusung nilai-nilai disiplin, ketertiban, dan nasionalisme produktif. Anak-anak yang dianggap bermasalah direpresentasikan sebagai warga muda yang perlu diarahkan agar berkontribusi positif bagi bangsa. Bahasa yang digunakan sering menekankan pentingnya pembinaan karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai ini sejalan dengan ideologi pembangunan yang menempatkan ketertiban sosial sebagai syarat bagi kemajuan nasional.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap kelima teks berita yang membingkai wacana barak militer oleh KDM, dapat diketahui bahwa struktur linguistik dan retorik dalam teks berita yang membingkai wacana barak militer oleh KDM berupa labelisasi dan eufemisme sebagai mekanisme kuasa simbolik, struktur kontras dan negasi sebagai strategi legitimasi, pilihan leksikal formal dan teknis sebagai bentuk rasionalisasi kebijakan, serta metafora dan hiperbola sebagai pembentuk persepsi moral dan krisis. Metafora dan hiperbola tersebut meliputi metafora moral-religius; metafora krisis dan ancaman; hiperbola penguat emosi dan polarisasi makna; interdiskursivitas antara wacana moral, politik, dan nasionalisme; serta modalitas sebagai penanda posisi ideologis (terdiri atas modalitas kepastian dan keharusan, modalitas kemungkinan, rasionalisasi dan ajakan kolaboratif).

Ideologi yang tecermin dalam wacana berupa idiologi kritis humanistik (*BBC News Indonesia*), ideologi tekno-birokratis dan reformis (*Okezone News*), ideologi hak anak dan etika sosial (*Tempo.co*), ideologi paternalistik-moral dan kolaboratif (*Kompas.com*), serta ideologi disiplin-ekonomistik (*Jawa Pos*).

Representasi sosial terhadap tokoh dan sasaran meliputi representasi anak dan KDM (negara). Anak direpresentasikan sebagai korban sistem sosial dan pendidikan yang gagal memberikan perlindungan (*BBC News Indonesia*, *Tempo.co*, dan *Okezone News*) dan sebagai subjek moral yang perlu dibina, bukan korban (*Kompas.com* dan *Jawa Pos*). Sementara itu, KDM direpresentasikan sebagai figur ayah bangsa dan pembimbing moral (*Kompas.com* dan *Jawa Pos*) dan sebagai figur paradoksal (antara moralitas dan kontrol sosial), berniat baik, tetapi menggunakan cara otoriter dan koersif (*BBC News Indonesia*, *Tempo.co*, dan *Okezone News*). Kemudian, berkaitan dengan nilai-nilai yang diusung, *BBC News Indonesia* dan *Tempo.co* menampilkan nilai-nilai yang berakar pada empati, kebebasan, hak anak, serta demokrasi pendidikan; *Okezone News* mengedepankan nilai profesionalisme, rasionalitas, dan akuntabilitas publik; *Kompas.com* menonjolkan nilai tanggung jawab moral, kemanusiaan, dan kolaborasi sosial; dan *Jawa Pos* mengusung nilai-nilai disiplin, ketertiban, dan nasionalisme produktif.

Referensi

- Althusser, L. (1971). *Ideology and Ideological State Apparatuses*. In *Lenin and Philosophy and Other Essays*.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change* (P. Press (ed.)).
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. Edward Arnold.
- Fairclough, N. (2001). *Language and Power* (2nd ed.). Longman.
- Fairclough, N. (2003a). *Analysing Discourse Textual analysis for social research*. Routledge.
- Fairclough, N. (2003b). *Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi*. Boyan Publishing.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd ed.). Routledge.
- Fajri, A. (2025). Rhetorical Study of Ideological Representation in Public Discourse: A Critical Analysis of Socio-Cultural Discourse. *Arsalingua*, 1(1), 61–71. <https://journal.pusakacendekia.org/index.php/arsa/about>
- Faucoult, M. (1981). The Order of Discourse. In R. Young (Ed.), *Untying the Text: A*

- Poststructuralist Reader* (pp. 48–78). Routledge & Kegan Paul.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage & The Open University.
- Ima, S. S., & Dawud. (2021). Fungsi Representasi Ideologi Kekuasaan dalam Tuturan Mata Najwa Bertema Politik. *JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts*, 1(8), 1011–1024. <https://doi.org/https://doi.org/10.17977/um064v1i82021p1011-1024>
- Mahsun. (2006). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pratama, A., Susandi, S., & Sriwulandari, Y. A. (2022). Dominasi Pertarungan Simbolik Ideologi Nadiem Makarim: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Konfiks*, 9(2), 24–33. <https://doi.org/https://journal.unismuh.ac.id/index.php/konfiks/article/view/9128>
- Putri, C. D., Aliya, N., Nabila, A., & JuwairaAsna. (2025). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk terhadap Wacana Pro-Kontra Pengiriman Anak ke Barak Militer dalam Pemberitaan Daring Liputan6.com. *Carong*, 1(4). <https://teewanjournal.com/index.php/carong%0D>
- Restiani, A., & Darmayanti, N. (2019). Representasi Politisi Indonesia: Analisis Wacana Kritis Fairclough dalam “Negeri Jenaka” (Mata Najwa). *Literasi*, 3(2), 63–69. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/literasi.v3i2.1755>
- Richardson, J. E. (2007). *Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis*. Palgrave Macmillan.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa: pengantar penelitian wahana kebudayaan secara linguistik*. Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-137-07299-3>
- Wodak, R., & Meyer, M. (2009). *Methods of Critical Discourse Analysis* (2nd ed.). SAGE.
- Zainuddin, I., Darwis, M., & Iswary, E. (2021). Representasi Ideologi di Balik Wacana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 dalam Media Kompas: Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Ilmu Budaya*, 9(2), 133–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.34050/jib.v9i2.14696>